

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *INTERNALLY DISPLACED PERSONS (IDPs)*

AKIBAT KONFLIK SOSIAL DI POSO

Fidhyah Azzahra*

This study aims to understand the legal protection of Internally Displaced Persons (IDP's) due to social conflict in Poso and to increase the knowledge and insights of researcher in the field of refugees under international law particularly on Legal Protection for Internally Displaced Persons (IDP's) Due to Social Conflict in Poso. The results of the author study are guidelines to give legal protection to IDPs due to conflict in Poso are Constitution of the Republic of Indonesia 1945, Law No. 39 Year 1999 on Human Rights, Presidential Decree No. 3 of 2001 jo Indonesia Presidential Decree No. 111 of 2001 on the National Coordinating Agency for Disaster Management and Refugees.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Masalah pengungsi sesungguhnya sudah timbul sejak umat manusia mengenal adanya konflik dan peperangan, karena umumnya yang menjadi pengungsi adalah korban dari aksi kekerasan atau mereka yang melarikan diri dari ganasnya perang yang terjadi di wilayahnya atau di negaranya. Sejak abad XX masalah pengungsi ini hanya menimbulkan keprihatinan dan belas kasihan tanpa adanya upaya untuk melindungi secara hukum baik status maupun hak-hak para pengungsi yang merupakan korban tindak kekerasan yang harus dilindungi hak-haknya sebagai manusia yang tertindas.¹

Masalah pengungsi sesungguhnya sudah timbul sejak umat manusia mengenal adanya konflik dan peperangan, karena umumnya yang menjadi pengungsi adalah korban dari aksi kekerasan atau mereka yang melarikan diri dari ganasnya perang yang terjadi di wilayahnya atau di negaranya. Sejak abad XX

¹ Aswatini dkk. 2003. *Pengungsi Dan Penanganannya: Suatu Tinjauan*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Hal 5.

masalah pengungsi ini hanya menimbulkan keprihatinan dan belas kasihan tanpa adanya upaya untuk melindungi secara hukum baik status maupun hak-hak para pengungsi yang merupakan korban tindak kekerasan yang harus dilindungi hak-haknya sebagai manusia yang tertindas.²

Munculnya pengungsi dalam negeri (*internally displaced persons selanjutnya disingkat IDP's*). Sudah sejak lama ada yaitu ketika berakhirnya perang dingin tahun 1991 antara Amerika Serikat dan Rusia. Dalam perang dingin, kedua negara tersebut berusaha untuk membantu negara sekutunya dengan memberikan bantuan senjata atau bantuan langsung dengan mengirimkan pasukan dalam jumlah besar yang memungkinkan negara tersebut melakukan kontrol secara penuh dan memerangi pemberontakan yang timbul di negara yang bersangkutan. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah setempat dalam melakukan kontrol tersebut menimbulkan tindak kekerasan yang memaksa penduduk untuk meninggalkan tempat tinggalnya sehingga timbul kasus-kasus IDP's.³

Sebelum tahun 1990-an penanganan *Internally Displaced Persons (IDPs)* tidak menjadi agenda PBB karena IDP's adalah penduduk di daerah konflik yang terpaksa berpindah ke wilayah lain yang masih berada dalam yurisdiksi negara. Dengan demikian, IDP's berada dalam konteks kedaulatan negara. Oleh karena itu tidak ada satupun badan PBB yang memiliki mandat untuk menangani IDP's.⁴

Konflik merupakan fenomena sosial yang dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari manusia. Hal itu bisa terjadi di manapun dan melanda komunitas manapun. Konflik adalah suatu proses sosial, proses perubahan dari tatanan sosial

² Aswatini dkk. 2003. *Pengungsi Dan Penanganannya: Suatu Tinjauan*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Hal 5.

³ Roberta Cohen and Francis M. Deng. 1998. *Masses in Flight: The Global Crisis of Internal Displacement*. Washington, D.C.: Brookings Institution Press. Hal 15.

⁴ UNHCR. 2007. *Melindungi Pengungsi Dan Peran UNHCR*. Hal 12.

yang lama ke tatanan sosial yang berbeda.⁵ Konflik antarkomunitas dalam masyarakat dapat dilihat sebagai kondisi yang wajar, tetapi menjadi tidak wajar ketika sudah melibatkan tindak kekerasan. Konflik berwajah agama, berlatar etnik, suku, ras, dan golongan, serta yang bernuansa politis muncul silih berganti di Indonesia. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari kebhinekaan Indonesia. Sebab secara teorik, semakin homogen suatu negara maka kompetensi konflik internalnya akan semakin rendah.

Semenjak bergulirnya reformasi pemerintahan pada tahun 1997 dan dengan tumbangnya pemerintah orde baru, Indonesia seperti mendapat kebebasan baru dan setiap orang merasa berhak untuk mendapat kebebasan tersebut. Tetapi ternyata reformasi ini tidak berjalan mulus dan di beberapa daerah timbul konflik yang berakhir dengan tindak kekerasan, seperti di Ambon, Maluku, Kalimantan Barat, dan Poso. Konflik tersebut menyebabkan 1.353.963 jiwa menjadi IDP's di bulan Agustus tahun 2002.⁶

Konflik yang terjadi di Poso di sinyalir oleh banyak kalangan adalah konflik bernuansa SARA (suku, agama, ras, dan antarkelompok) tetapi sebenarnya konflik tersebut tidaklah sesederhana itu, karena melibatkan juga persilangan antar etnik, baik lokal maupun pendatang dan kepentingan politik sipil maupun militer serta masuknya kekuatan luar, baik seperti laskar jihad maupun militer seperti satuan-satuan TNI dan Polri. Korban tewas, korban luka, dan kerugian materil yang tidak sedikit menjadi akibat yang mengikuti peristiwa tersebut. Secara umum konflik di Poso sudah berlangsung tiga kali.⁷

⁵ <http://hery15061993.blogspot.com/2012/01/penyebab-konflik-poso.html> Diakses Pada 20 Juni 2012. Pukul 09.04 WITA

⁶ *Op cit.* Aswatini dkk. 2003. *Pengungsi Dan Penanganannya: Suatu Tinjauan*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Hal 11-12

⁷ <http://konflikposo.blogspot.com/2009/03/konflik-poso.html> Diakses Pada 20 Juni 2012. Pukul 09.15 WITA.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi *Internally Displaced Persons (IDP's)* akibat konflik sosial di Poso?
2. Bagaimanakah penanganan *Internally Displaced Persons (IDP's)* akibat konflik sosial di Poso?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi *Internally Displaced Persons (IDPs)* akibat konflik sosial di Poso
2. Untuk mengetahui penanganan *Internally Displaced Persons (IDPs)* akibat konflik sosial di Poso dan untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti di bidang pengungsi yang termasuk dalam hukum internasional khususnya mengenai Perlindungan Hukum Bagi *Internally Displaced Persons (IDPs)* Akibat Konflik Sosial Di Poso.

D. Manfaat Penelitian

Salah satu faktor pemilihan masalah dalam penelitian ini adalah hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat karena nilai dari sebuah penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari adanya penelitian tersebut. Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya, hukum internasional mengenai pengungsi pada khususnya.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Guna mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam mengkritisi persoalan-persoalan hukum yang diharapkan dapat dipakai sebagai bahan evaluasi tentang permasalahan pengungsi baik oleh negara Indonesia maupun di dunia internasional.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman bagi pihak-pihak terkait yang tertarik terhadap persoalan pengungsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengungsi

1. Sejarah Pengungsi

Pengungsi merupakan persoalan klasik yang timbul dalam peradaban umat manusia sebagai akibat adanya rasa takut yang sangat mengancam keselamatan mereka. Ancaman itu ditimbulkan oleh bencana alam atau karena bencana buatan manusia.⁸ Pada abad ke 17, dalam sejarah Amerika, perpindahan penduduk dari Inggris ke Amerika dan menempati daerah yang dikenal dengan nama “New England”, juga merupakan pengungsi. Perang Balkan (1912-1913) menimbulkan gelombang pengungsian ke bagian tenggara Eropa. Arus pengungsi ini terus berlanjut sampai Perang Dunia I. Pengungsi dari Rusia sebanyak 1,5 juta orang, sebagai akibat dari Revolusi Rusia pada tahun 1921. mereka mengungsi ke negara-

⁸ *Op cit.* Achmad Romsan dkk. 2003. *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional Dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*. Cetakan Pertama. Bandung: Sanic Offset. Hal 3.

negara lain di Eropa. Pengungsi Yahudi Jerman di tahun 1933 sebagai akibat dari bangkitnya paham Nazi di Jerman.⁹

2. Pengertian Pengungsi

a. Pengertian Pengungsi Secara Harfiah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa akar kata dari istilah pengungsi adalah ungsi dan kata kerjanya adalah mengungsi, yaitu pergi mengungsi (menyingkirkan) diri dari bahaya atau menyelamatkan diri (ke tempat yang memberikan rasa aman). Sedangkan *pengungsi* adalah kata benda yang berarti orang yang mengungsi.¹⁰

b. Pengertian Pengungsi Menurut Pendapat Para Ahli

Beberapa ahli memberikan pengertian pengungsi, antara lain:

a. Pietro Verri

Pietro Verri memberikan definisi tentang pengungsi dengan mengutip bunyi pasal 1 UN Convention on the Status of Refugees tahun 1951:¹¹

'applies to many person who has fled the country of his nationality to avoid persecution or the threat of persecution'.

Di sini pengungsi adalah orang-orang yang meninggalkan negaranya karena adanya rasa ketakutan akan penyiksaan atau ancaman penyiksaan. Jadi terhadap mereka yang mengungsi masih dalam lingkup wilayah negaranya belum dapat disebut sebagai pengungsi menurut Konvensi Tahun 1951.

⁹ *Ibid.*, Hal 55-56.

¹⁰ *Op cit*, Achmad Romsan dkk. 2003. *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional Dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*. Cetakan Pertama. Bandung: Sanic Offset Hal 35-36.

¹¹ *Ibid.*, Hal 36-37.

b. Sulaiman Hamid

Pengungsi (*refugees*) adalah orang yang terpaksa memutuskan hubungan dengan negara asalnya karena rasa takut yang berdasar mengalami persekusi dan tak mungkin lagi kembali.¹²

B. *Internally Displaced Persons (IDPs)*

1. Pengertian *Internally Displaced Persons (IDPs)*

Istilah *Internally Displaced Persons/IDP's* digunakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan UNHCR pertama kali pada tahun 1972 untuk menunjuk orang-orang di Sudan, yang karena terjadi konflik bersenjata internal di negara itu terpaksa meninggalkan kampung halamannya untuk pergi ke tempat-tempat lain yang lebih aman, tetapi masih dalam wilayah Negara mereka sendiri. Istilah ini dipakai sampai pada tahun 1974.¹³ *Internally Displaced Persons/IDP's* adalah individu atau sekelompok orang yang dipaksa meninggalkan kampungnya karena menghindari pertikaian bersenjata, kekerasan umum, pelanggaran hak azasi.¹⁴

Sejak tahun 1975 UNHCR dan PBB memakai istilah ini untuk merujuk orang-orang yang meninggalkan kampung halamannya untuk pergi ke tempat lain yang dirasanya aman, sebagai akibat terjadinya konflik bersenjata di negara asalnya, tetapi yang (sudah) berada di luar perbatasan negara asalnya. Untuk *displaced persons* dalam pengertian semula (tetap masih berada dalam wilayah negara yang sama), dan untuk itu UNHCR memakai istilah *Internally Displaced*

¹² Sulaiman Hamid. 2002. *Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. Hal 47.

¹³ Heru Susetyo. 2004 Kebijakan Penanganan *Internally Displaced Persons (IDP's)* di Indonesia dan Dunia Internasional. Volume 2 Nomor 1. Depok: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional fakultas Hukum Universitas Indonesia. Hal 147.

¹⁴ UNHCR. 2007. *Pengungsi Dalam Negeri Sendiri (IDP) Pertanyaan & Jawaban*. Hal 6.

Persons/IDPs.¹⁵ Istilah *displaced persons* dalam berbagai resolusi Majelis Umum tahun 1975 yang memberikan hak kepada UNHCR untuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada orang-orang terlantar (*displaced persons*) di luar negara asal yang tidak dimasukkan dalam “kondisi seperti pengungsi”, akibat kejadian-kejadian (kadang-kadang sebagai “bencana buatan manusia”) yang timbul dalam negara asal mereka.¹⁶

Dalam *Guiding Principles on Internal Displacement*, angka 2 pengantar, memuat pengertian dari istilah *Internally Displaced Persons (IDPs)* sebagai berikut.¹⁷

“...internally displaced persons are persons or groups of persons who have been forced or obliged to flee or to leave their homes or places of habitual residence, in particular as a result of or in order to avoid the effects of armed conflict, situations of generalized violence, violations of human rights or natural or humanmade disasters, and who have not crossed an internationally recognized state border”

Jadi *Internally Displaced Persons* adalah orang-orang atau sekelompok orang yang dipaksa atau diharuskan meninggalkan rumah atau tempat tinggal mereka, terutama sebagai akibat atau disebabkan konflik bersenjata, dalam situasi terjadi pelanggaran, pelanggaran hak asasi manusia atau peristiwa alam atau karena perbuatan manusia, dan tidak menyeberang perbatasan negara yang diakui secara internasional.

C. Pengungsi Poso

Poso merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki luas wilayah 14.433,76 Km² dengan letak geografis 0,35-1,20 LU dan

¹⁵ *Op cit.* Heru Susetyo. 2004 Kebijakan Penanganan *Internally Displaced Persons (IDP's)* di Indonesia dan Dunia Internasional. Volume 2 Nomor 1. Depok: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional fakultas Hukum Universitas Indonesia. Hal 148.

¹⁶ <http://ml.scribd.com/doc/42461649/Pengungsi-Di-Negeri-Sendiri> Diakses Pada 1 Februari 2012. Pukul 10. 30 WITA

¹⁷ Marc Vincent and Birgitte Refslund Sorensen. 2001. *Caught Between Border Respon Strategies of the Internally Displaced*. London: Pluto Press. Hal 6-7s.

120,12-122,09 BT. Di wilayah administratif kabupaten Poso menyebar 13 kecamatan yang membawahi 211 desa dan 29 kelurahan, yang didiami 231.891 jiwa¹⁸ dengan pluralitas masyarakat yang hidup dari beragam komunitas etnis dan agama.

Sebelum meletus konflik bulan Desember tahun 1998 dan diikuti oleh beberapa peristiwa konflik lanjutan, sebenarnya Poso pernah mengalami ketegangan hubungan antar komunitas keagamaan (Muslim dan Kristen) yakni tahun 1992 dan tahun 1995.¹⁹ Namun, setelah peristiwa tahun 1992 dan tahun 1995, masyarakat kembali hidup secara wajar. Tetapi seiring dengan runtuhnya Orde Baru, dan lemahnya peran "aparatus keamanan" yang sedang digugat disemua lini melalui berbagai isu, kerusuhan Poso kembali meletus, bahkan terjadi secara beruntun dan bersifat lebih masif. Awal kerusuhan terjadi bulan Desember tahun 1998, konflik kedua terjadi bulan April tahun 2000, tidak lama setelah kerusuhan tahap dua terjadi lagi kerusuhan ketiga di bulan Mei sampai bulan Juni tahun 2000. Konflik masih terus berlanjut dengan terjadinya kerusuhan keempat pada bulan Juli tahun 2001, dan kelima pada bulan November tahun 2001. Peristiwa-peristiwa tersebut memperlihatkan adanya keterkaitan antara satu dengan yang lain, sehingga kerusuhan-kerusuhan dicermati dalam konteks jilid satu sampai lima.²⁰

Konflik-konflik dalam masalah nasional dalam kenyataannya sering menimbulkan bencana kemanusiaan yang berakibat jauh bagi keamanan hidup dan kesejahteraan umat manusia. Di samping telah membawa luka yang dalam bagi masyarakat Indonesia, masalah yang ditimbulkan konflik tersebut dalam banyak kasus telah membebani banyak pihak dalam jangka waktu yang cukup panjang.

¹⁸ Sensus penduduk tahun 2000.

¹⁹ <http://www.kontras.org/poso/index.php?hal=berita&id=> Diakses Pada 20 Juni 2011. Pukul 10.00 WITA

²⁰ *Ibid.*

Belum lagi persoalan yang timbul, dan dirasakan juga oleh kota-kota sekitar yang sebenarnya tidak terlibat dalam konflik itu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian di Makassar dan Jakarta. Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan di berbagai tempat yang dianggap mempunyai data yang sesuai dengan objek yang diteliti, seperti:

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
2. Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin
3. Perpustakaan Wilayah Sulawesi Selatan
4. Kantor Perwakilan UNHCR Jakarta
5. Markas Besar Palang Merah Indonesia
6. Kementerian Sosial RI

B. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka, berupa buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal ilmiah, dan hasil penelusuran melalui situs internet.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang akan menjadi sumber informasi yang digunakan oleh penulis dalam menyelesaikan penelitian hukum ini adalah :

- a. Buku-buku yang berhubungan dengan judul skripsi ini
- b. Literatur-literatur lain yang berhubungan dengan judul skripsi ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi keputakaan (*Library Search*) untuk memperoleh data sekunder yang terdiri dari data hukum primer yakni *The Guiding Principles on Internal Displacement*.

Bahan hukum sekunder yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian dan pendapat pakar hukum. Serta bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum), dan ensiklopedia.²¹

D. Teknik Analisis Data

Agar data yang terkumpul dapat dipertanggungjawabkan serta menghasilkan jawaban dari permasalahan maka perlu suatu bentuk teknik analisis data yang tepat. Penganalisaan data merupakan tahap yang penting karena pada tahap ini data yang terkumpul yaitu data yang berupa data sekunder, maka penulis berusaha mengolah dan menganalisanya. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah metode deduksi, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip dasar yang kemudian peneliti tersebut menghadirkan objek yang hendak diteliti. Metode deduksi adalah prosedur penyimpulan logika ilmu pengetahuan, yaitu bertolak dari suatu proporsi

²¹ Soerjono Soekanto.2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press). Hal 12.

umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat lebih khusus.²²

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi *Internally Displaced Persons (IDP's)* Akibat Konflik Sosial Di Poso

Konflik sosial yang terjadi di Poso tahun 1998 telah menelan korban tewas hampir 300 jiwa, ratusan orang tak diketahui nasibnya, dan hampir 70.000 jiwa mengungsi adalah suatu tragedi kemanusiaan yang memilukan.²³ Di saat bangsa Indonesia tengah menata diri untuk membentuk Indonesia baru yang lebih damai dan tenteram ternyata masih ada komponen bangsa yang bermain di air keruh, mengobarkan perpecahan, dan meluluhlantakkan nilai-nilai kemanusiaan yang selama ini begitu dijunjung tinggi. Lebih dari itu, realita konflik berupa pembantaian massal dan penyiksaan merupakan suatu pelanggaran HAM yang bertentangan dengan instrumen HAM nasional maupun internasional manapun.

Banyaknya pelanggaran HAM yang dialami masyarakat Poso mengharuskan pemerintah untuk menindaklanjuti para pelaku kejahatan tidak hanya dengan peraturan nasional mengenai penanganan pengungsi dalam negeri tetapi juga peraturan nasional mengenai HAM. Menurut Andiana Pajalaksana, kedudukan pengungsi dalam negeri sebenarnya harus dilihat dari sudut pandang yang lebih luas sebab pengungsi dalam negeri adalah golongan orang yang masih berstatus warga negara. Walaupun di dalam undang-undang tidak tertulis secara langsung mengenai perlindungan HAM bagi pengungsi dalam negeri tetapi peraturan tersebut

²² *Ibid.* Hal 13.

²³ <http://www.unhcr.or.id/id/> Diakses 25 Juni 2012. Pukul 10.40 WITA

juga berlaku bagi pengungsi dalam negeri karena undang-undang tidak membedakan status warga negara yang dilindungi sehingga peraturan hukum di bidang HAM juga berlaku bagi pengungsi dalam negeri.²⁴

1. Peraturan Perundangan di Indonesia yang mengatur mengenai perlindungan bagi *Internally Displaced Persons (IDP's)*

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah IDP's yang cukup besar mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negaranya yang terpaksa menyingkir dari tempat tinggalnya karena konflik maupun karena bencana alam. Berikut beberapa peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap pengungsi dalam negeri:

a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Perlindungan terhadap pengungsi dalam negeri tidak terlepas dari perlindungan HAM. Perlindungan HAM diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, baik sebelum maupun sesudah perubahan amendemen. Perbedaannya sebelum dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 hanya mengandung 6 pasal yang secara eksplisit mengatur mengenai HAM, namun mengandung 15 prinsip HAM. Sementara setelah terjadi amendemen Undang-Undang Dasar 1945 ada 42 prinsip HAM.

Prinsip-prinsip HAM yang tidak diperoleh oleh masyarakat Poso meliputi : hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan mempertahankan kehidupan (Pasal 28 A); hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang (pasal 28B); hak atas perlindungan bagi anak atas kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28B); hak atas pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan

²⁴ Hasil wawancara dengan Andiana Pajalaksana, staf Direktorat Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia. 8 Juni 2012. Pukul 13.30 WITA

kesejahteraan manusia (Pasal 28C); hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di muka hukum (Pasal 28D); hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (Pasal 28D); kebebasan beragama dan beribadat menurut agama (Pasal 28E, pasal 28I, dan pasal 29); kebebasan memilih pendidikan dan pengajaran (Pasal 28E); kebebasan memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali (Pasal 28E); hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan martabat, dan harta benda di wilayah kekuasaannya (Pasal 28G); hak rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Pasal 28G); hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia (Pasal 28G); hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan (pasal 28H); hak untuk tidak disiksa (Pasal 28I); hak untuk tidak diperbudak (pasal 28I); hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (Pasal 28I); hak untuk terbebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif (Pasal 28I).

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM

Undang-undang ini juga tidak menyebutkan secara langsung mengenai pemenuhan hak asasi perlindungan pengungsi dalam negeri. Namun demikian menurut undang-undang ini yang dimaksud dengan hak asasi manusia (pasal 1 angka 1) adalah :

“Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya

yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Dalam pasal selanjutnya dikatakan bahwa pemenuhan dan perlindungan terhadap HAM tidak boleh dilakukan secara diskriminatif (Pasal 3 ayat 3). Dengan demikian maka hak-hak dan kebebasan dasar diatur dalam Undang-Undang HAM ini berlaku pula bagi pengungsi dalam negeri, yang merupakan warga negara Indonesia. Keadaan pengungsi dalam negeri yang serba terbatas tidak boleh dijadikan alasan untuk memberikan perlakuan yang diskriminatif dalam pemenuhan hak dan kebebasan dasar manusia. Adapun hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia yang diatur dalam Undang-Undang HAM adalah :

- 1) Hak untuk hidup (Pasal 9);
- 2) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan (Pasal 10);
- 3) Hak mengembangkan diri (pasal 11 - Pasal 16);
- 4) Hak memperoleh keadilan (Pasal 17 - Pasal 19);
- 5) Hak atas kebebasan pribadi (Pasal 20 – Pasal 27);
- 6) Hak atas rasa aman
- 7) Hak atas kesejahteraan (Pasal 36 – Pasal 42);
- 8) Hak turut serta dalam pemerintahan (Pasal 43 – Pasal 44);
- 9) Hak wanita (Pasal 45 – Pasal 51);
- 10) Hak anak (Pasal 52 – Pasal 66);
- 11) **Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2001 Tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi**

Selain peraturan yang berupa undang-undang, terdapat peraturan yang mengatur mengenai penanganan pengungsi dalam negeri, yaitu: Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2001 Tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Bakornas PBP) di tingkat pusat dan di tingkat daerah, di tingkat provinsi dibentuk Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Satkorlak PBP), sedangkan untuk di tingkat Kabupaten/Kota dibentuk Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Satlak PBP).

Secara eksplisit hal-hal yang diatur dalam keppres hanya pengungsi dalam negeri yang diakibatkan bencana saja. Dengan demikian secara penafsiran gramatikal hanya akan berlaku bagi pengungsi akibat bencana alam saja, akan tetapi apabila ditafsirkan secara lebih lanjut, bencana dapat dikategorikan sebagai bencana alam (*disaster*) dan bencana buatan manusia (*man made disaster*). Bencana buatan manusia seperti konflik antar suku, konflik bersenjata, dan lain sebagainya.

Konflik sosial yang terjadi di Poso telah menelan banyak korban, baik yang luka-luka maupun meninggal dunia. Konflik juga telah menyebabkan sejumlah fasilitas umum dan fasilitas sosial menjadi rusak, bahkan hancur sama sekali. Upaya penanganan para korban terutama yang luka-luka juga sudah mendapat penanganan dari tim medis setempat, serta penguburan mayat-mayat yang menjadi korban konflik. Demikian pula perbaikan fasilitas umum dan

fasilitas sosial tersebut telah dilakukan meskipun sebagian masih bersifat darurat.²⁵

Dalam Pasal 1 ayat (3) yang dimaksud penanganan pengungsi adalah:

‘Penanganan pengungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi upaya pelayanan dan perlindungan kemanusiaan terhadap pengungsi yang timbul akibat konflik. Baik sosial maupun politik yang terjadi pada suatu daerah, yang meliputi kegiatan pencegahan, tanggap darurat, penampungan, pemindahan dan pengembalian/relokasi pengungsi.’

Penanganan pengungsi akibat konflik dilakukan dengan kegiatan meliputi upaya operasional yang bersifat koordinatif seperti, pendataan, penempatan pada lokasi yang aman, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Dalam kelompok masyarakat pengungsi juga dikenal kelompok rentan yang lebih mendapatkan prioritas perlakuan yang berbeda dalam hal penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial oleh karena kondisi kerentanan tersebut. Kelompok rentan yaitu:

- a. Bayi, balita, dan anak-anak;
- b. Ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
- c. Penyandang cacat; dan
- d. Orang lanjut usia.

Pemenuhan kebutuhan dasar yang diperlukan bagi korban konflik antara lain penyediaan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan sementara. Pemenuhan kebutuhan dasar dilakukan oleh pemerintah pusat yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Pemberian perlindungan bagi pengungsi dalam negeri tidak hanya berhenti pada masa darurat saja melainkan sampai pada masa pasca konflik, misalnya perbaikan

²⁵ Eddy Sudaryono, dkk. 2008. *Pemukiman Kembali Pengungsi Akibat Konflik Sosial*. Jakarta: Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sosial Ekonomi Budaya dan Peran Masyarakat Badan Penelitian Dan Pengembangan Departemen Pekerjaan Umum. Hal 1.

lingkungan daerah konflik, perbaikan prasarana, dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, pemulihan sosial, ekonomi dan budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban dan pemulihan fungsi pelayanan publik.

Jadi Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi juga bisa dijadikan pedoman dalam penyelesaian masalah pengungsi di Poso. Sebab itu apapun alasan dan latar belakang terjadinya pengungsian, pemerintah perlu segera mengupayakan dan menangani secara cepat dan terkoordinasi melalui kegiatan pencegahan, penyelamatan, dan rekonstruksi.

2. Upaya Penanganan Konflik Sosial Di Poso

Untuk menyelesaikan konflik di Poso, telah dilakukan Deklarasi Malino untuk Poso (dikenal pula sebagai Deklarasi Malino I). Deklarasi itu ditandatangani pada 20 Desember 2001 oleh 24 anggota delegasi Kelompok Kristen dan 25 anggota dari delegasi Kelompok Islam. Terdapat 10 poin dalam kesepakatan tersebut yakni:

1. Menghentikan semua bentuk konflik dan perselisihan.
2. Menaati semua bentuk dan upaya penegakan hukum dan mendukung pemberian sanksi hukum bagi siapa saja yang melanggar.
3. Meminta aparat negara bertindak tegas dan adil untuk menjaga keamanan.
4. Untuk menjaga terciptanya suasana damai menolak memberlakukan keadaan darurat sipil serta campur tangan pihak asing.
5. Menghilangkan seluruh fitnah dan ketidakjujuran terhadap semua pihak dan menegakkan sikap saling menghormati dan memaafkan satu sama lain demi terciptanya kerukunan hidup bersama.

6. Tanah Poso adalah bagian integral dari Indonesia. Karena itu, setiap warga negara memiliki hak untuk hidup, datang dan tinggal secara damai dan menghormati adat istiadat setempat.
7. Semua hak-hak dan kepemilikan harus dikembalikan ke pemiliknya yang sah sebagaimana adanya sebelum konflik dan perselisihan berlangsung.
8. Mengembalikan seluruh pengungsi ke tempat asal masing-masing.
9. Bersama pemerintah melakukan rehabilitasi sarana dan prasarana ekonomi secara menyeluruh.
10. Menjalankan syariat agama masing-masing dengan cara dan prinsip saling menghormati dan menaati segala aturan yang telah disetujui baik dalam bentuk UU maupun dalam peraturan pemerintah dan ketentuan lainnya.

Setelah Deklarasi Malino untuk Poso diberlakukan, konflik terbuka antarkelompok di Poso berhasil dihentikan sementara. Namun dalam perjalanannya, kekerasan di Poso masih kerap terjadi. Berbagai kasus bermunculan seperti teror, upaya mengadu domba yang dapat dilihat melalui penembakan-penembakan misterius, pembunuhan, peledakan bom, bahkan dengan tulisan-tulisan di dinding rumah penduduk yang sifatnya provokasi. Pada tahun 2002 hingga tahun 2005 telah terjadi setidaknya 10 kali teror bom yang merenggut puluhan nyawa. Pengeboman di antaranya terjadi pada 28 Mei 2002 di Pasar Sentral Poso dan pada 5 Juni 2002 di sebuah bus umum, PO Antariksa jurusan Palu – Tentena. Peristiwa-peristiwa tersebut kembali menimbulkan rasa trauma, saling curiga dan meningkatkan sensitivitas di tingkat masyarakat.²⁶

²⁶ http://posobersatu.multiply.com/journal?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal Diakses Pada 30 Agustus 2012. Pukul 19.46 WITA

Konflik Poso bisa dilihat dari perspektif teori segitiga ABC Galtung yang dikembangkan oleh Johan Galtung.²⁷ Segitiga konflik dipergunakan untuk memisahkan komponen suatu konflik pada 3 (tiga) kutub, namun ketiga kutub ini berkaitan satu dengan lainnya. Kutub C (*contradiction*) diartikan sebagai kontradiksi/pertentangan yang merupakan akar sebuah konflik. Konfrontasi ini bersumber pada kutub A (*attitudes*) yang diartikan sikap dan kutub B (*behavior*) yang diartikan perilaku.²⁸ Ketiga kutub tersebut masing-masing bisa menjadi akar dari suatu konflik. Suatu konflik mungkin berawal dari kontradiksi-kontradiksi yang menyelubungi sekelompok orang. Kondisi ini berpengaruh pada tingkah laku yang mereka lakukan, atau kepercayaan dan persepsi yang mereka punyai tentang satu sama lain. Sekali konflik bermula dari satu kutub, biar bagaimanapun, akan cepat meluas kepada kutub yang lainnya. Dalam hal ini ketiga titik menjadi saling menguatkan satu sama lain dalam konflik.²⁹

Konflik Poso dalam perspektif teori ABC Galtung merupakan konflik yang dihasilkan dari interaksi 3 faktor Faktor pertama adalah *attitude* (A) baik dari etnik yang berkonflik dengan aparat keamanan. Kecurigaan dari etnik yang berkonflik kepada aparat keamanan justru diyakini sebagai aktor baru dalam konflik. Bertambahnya pasukan keamanan yang dikirim ke Poso dalam batas tertentu belum menyebabkan meredanya konflik, namun sebaliknya justru menjadi pemicu meningkatnya konflik itu sendiri.³⁰

Penempatan pasukan keamanan dilakukan untuk menjaga keamanan di Poso. Pada April hingga Juni 2000, Polda Sulteng mulai menggelar operasi

²⁷ Surwandono. 2008. *Konflik Poso dan Public Trust*. Volume 1. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Politik Yogyakarta. Hal 11.

²⁸ Johan Galtung. 2000. *Conflict Transformation by Peaceful Means (the Transcend Method)*. United Nations: United Nations Disaster Management Training Programme. Hal. 34-35

²⁹ *Ibid*.

³⁰ *Op.cit*. http://posobersatu.multiply.com/journal?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal Diakses Pada 30 Agustus 2012. Pukul 19.46 WITA

keamanan bertitel Operasi Sadar Maleo. Operasi digelar hingga lima tahap ini efektif dimulai 1 Juli 2000. Ada 14 Satuan Setingkat Kompi (SSK) aparat TNI dan Polri diterjunkan untuk mengamankan Poso. Kodam VII Wirabuana, komando daerah militer yang membawahi Komando Resort Militer se-Sulawesi, juga menggelar Operasi Cinta Damai. Meski sempat menekan letupan pertikaian, hingga berakhirnya operasi tersebut pada 10 Desember 2001, hasil yang dicapai belum optimal. Saat Poso belum aman juga, pasukan keamanan ditingkatkan menjadi 23 SSK. Namun serangkaian penyerangan, pembakaran rumah warga, penculikan, dan pembunuhan masih saja terjadi. Hingga akhirnya digelar Operasi Pemulihan Keamanan Terpadu di Poso dengan sandi Operasi Sintuvu Maroso pada Desember 2001. Pada 17 Juni 2002, setelah dilakukan monitoring, analisa dan evaluasi, diputuskan Sintuvu Maroso tetap dilanjutkan selama tiga bulan dengan operasi kemandirian wilayah, mulai 1 Juli hingga 30 September 2002 dengan sandi Sintuvu Maroso-1.³¹

Sesuai Deklarasi Malino, pemulihan keamanan dengan operasi terpusat tersebut semestinya berakhir 30 Juni 2002. Namun dalam perjalanannya operasi tersebut terus diperpanjang hingga 7 kali pada tahun 2005 tanpa evaluasi yang menyeluruh atas operasi sebelumnya. Meski diperpanjang beberapa kali, operasi tersebut tidak mampu mengurangi angka kekerasan yang terjadi di Poso. Bahkan sering kali hal itu menimbulkan peningkatan jumlah konflik di masyarakat lantaran aparat keamanan justru menjadi pelaku kekerasan berupa pemukulan, penembakan, pencurian, kekerasan terhadap perempuan, penangkapan sewenang-wenang disertai penyiksaan, dan stigmatisasi terorisme kepada warga.³²

³¹ *Op.cit.* Harullah. 2009. *Dendam Konflik Poso: Konflik Poso dan Perspektif Komunitas*. Jakarta: Gramedia Pustaka. Hal 55.

³² *Op.cit.* Harullah. 2009. *Dendam Konflik Poso: Konflik Poso dan Perspektif Komunitas*. Jakarta: Gramedia Pustaka. Hal 56-57.

Hal itu lantas berimbas ke dalam *behavior* (B) dari bingkai konflik di Poso. Konflik etnik yang awalnya menggunakan senjata seadanya kemudian mengalami peningkatan yang cukup signifikan karena bertambahnya peredaran senjata baik rakitan ataupun organik sebagai akibat meluasnya konflik. Pada peristiwa kekerasan yang terjadi di Poso pada Desember 1998 dan April 2000, pola penyerangan antarkomunitas berlangsung terbuka. Serangan tersebut melibatkan massa kedua pihak berjumlah ratusan hingga ribuan. Massa yang berkonflik menggunakan batu, senjata tajam, senapan angin, bom ikan, dan senjata rakitan dalam jumlah amat terbatas. Lalu pada peristiwa Poso Mei-Juni 2000, serangan antarkomunitas terjadi secara terbuka dengan melibatkan massa ribuan. Penyerangan yang dilakukan oleh kedua pihak yang berkonflik masih menggunakan senjata tajam, tetapi pemakaian senjata rakitan kian marak, selain senjata api organik.³³

Pola ini terus berlanjut hingga Deklarasi Malino. Perang terbuka kerap terjadi dengan melibatkan pasukan dalam jumlah besar. Penggunaan senjata api rakitan dan organik, selain bom dan senjata tajam tetap terjadi. Serangan dilakukan kapan saja oleh para penyerang yang tidak berusaha menyembunyikan identitasnya. Setelah Deklarasi Malino, kekerasan (pengeboman, ancaman bom, pembunuhan, penyerangan) yang terjadi bersifat misterius lantaran dilakukan pada malam hari oleh orang-orang yang menyembunyikan identitasnya. Hal itu dikarenakan aparat keamanan telah menarik sejumlah senjata yang dimiliki pihak-pihak yang bertikai.³⁴

Terkait kepemilikan senjata, hal itu sepertinya menjadi sebuah keharusan bagi setiap pihak yang berkonflik untuk bisa meningkatkan preferensi rasa aman. Dengan memiliki senjata berarti akan bisa segera melakukan pembalasan apabila kelompoknya diserang oleh kelompok lainnya. Tidak heran senjata yang dimiliki

³³ *Ibid.* Hal 57.

³⁴ *Ibid.* Hal 58.

pihak bertikai semakin banyak sejak konflik mencuat di Poso. Meningkatnya eskalasi konflik di Poso juga tidak bisa dilepaskan dari persoalan *contradiction* (C). Terlalu banyaknya rumor yang berkembang sekitar konflik Poso menyebabkan arah konflik menjadi serba tidak jelas. Apakah konflik yang terjadi karena agama murni, bersintesis dengan konflik ekonomi, politik, atau rekayasa elite, selalu berseliweran di tengah publik Poso. Penyebab konflik seolah kabur. Apalagi terjadi kesenjangan sosial yang semakin melebar dan ketidakadilan terutama terkait marginalisasi politik antara penduduk asli dengan pendatang. Para provokator yang tidak menginginkan perdamaian di tanah Poso sengaja menghembuskan isu yang sensitif dan mengundang emosi yakni etnis dan agama. Apalagi kebanyakan masyarakat Poso memiliki tingkat intelektualitas yang relatif rendah sehingga mudah terprovokasi.³⁵

Penyelesaian konflik di Poso yang dilakukan oleh pemerintah selama ini lebih mengedepankan pendekatan keamanan daripada komunikasi. Karena itu apa yang diinginkan oleh pihak-pihak yang bertikai serta akar penyebab konflik tidak pernah tersentuh. Akhirnya yang terjadi situasi keamanan di Poso bersifat fluktuatif. Agar keamanan di Poso bersifat permanen, perlu dilakukan mediasi kedua pihak yang bertikai yakni masyarakat beragama Islam dengan yang beragama Kristen, dan dimediasi oleh pemerintah pusat sebagai pihak yang netral. Selain itu perlu pendekatan budaya mengingat Poso adalah daerah yang sangat heterogen. Terlebih sebelumnya, masyarakat di Poso baik yang asli maupun pendatang hidup berdampingan dengan damai dengan mengusung nilai-nilai kearifan lokal. Nilai kearifan lokal yang dikenal masyarakat Poso, Sintuwu, perlu dipupuk dan diperkenalkan kepada generasi muda setempat.

³⁵ *Ibid.* Hal 58-59.

B. PENANGANAN *INTERNALLY DISPLACED PERSONS (IDP's)* AKIBAT KONFLIK SOSIAL DI POSO

1. Peranan Pemerintah Indonesia dalam menangani *Internally Displaced Persons (IDP's)* di Poso

Konflik sosial yang terjadi di Poso menyebabkan pengungsian besar-besaran oleh masyarakat Poso. Mereka mengungsi karena desa mereka diserang massa dan rumah mereka habis terbakar dan mereka juga mendapat terror dari orang-orang yang tidak dikenal. Warga mengungsi dengan berjalan kaki melewati hutan atau diangkut truk dengan kawalan aparat keamanan. Hampir semua tempat di Sulawesi Tengah yang tidak menjadi daerah konflik dan bisa dijangkau dengan perjalanan mobil, perahu tradisional, maupun dengan berjalan kaki menjadi sasaran pengungsian.³⁶ Lebih lanjut menurut Andiana Pajalaksana pemerintah daerah pada saat itu menampung para pengungsi di gedung-gedung sekolah atau fasilitas publik lainnya sambil menyiapkan barak-barak pengungsian. Tempat yang dipilih tentunya yang aman dari daerah konflik.

Menurut data Kementerian Sosial Republik Indonesia, dari 12 lokasi pengungsian yang tersebar di Kecamatan Pamona Utara, lokasi pengungsian yang menjadi sasaran pemantauan adalah lokasi pengungsian Later dan lokasi pengungsian Malewa. Di lokasi pengungsian Later masih tinggal 360 KK dan di Malewa 98 KK karena hanya pada lokasi-lokasi inilah keberadaan pengungsi masih cukup terorganisir dan itu yang memudahkan pemantauan untuk mendapatkan informasi. Di kedua lokasi, pengungsi diberikan bantuan-bantuan rumah tinggal sederhana dalam bentuk barak-barak pengungsian. Bantuan dana, sandang,

³⁶ Hasil wawancara dengan Andiana Pajalaksana, staf Direktorat Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia. 8 Juni 2012. Pukul 13.30 WITA

pangan, sanitasi, dan air bersih juga diberikan oleh pemerintah dan masyarakat setempat.³⁷

Ketika konflik mereda pemerintah daerah berusaha melakukan pemulangan dan relokasi pengungsi karena barak-barak pengungsian jelas menjadi tempat yang tidak menyenangkan, baik dari segi estetis maupun kemanusiaan.³⁸ Pengungsi dalam negeri apalagi yang menjadi korban konflik kekerasan seperti di Poso bukanlah contoh yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, kejadian tersebut justru menjadi gambaran kerusakan hidup bersama sekaligus menggugah suara hati siapa saja tentang rasa keadilan dan penderitaan.

Konflik kekerasan di Indonesia lahir sebagai benturan sosial yang pada dasarnya ialah masalah hidup bersama di tengah ragam kebudayaan, adat istiadat, suku, dan agama. Termasuk akarnya ialah masalah pembagian kekayaan ekonomi daerah, soal pemerataan, dan keadilan pembangunan daerah-daerah. Rasa tidak adil, otonomi, dan luka lama konflik antarkomunitas.³⁹

Pengungsi dalam negeri khususnya akibat konflik sosial seperti yang terjadi di Poso melewati pengalaman kekerasan, tentu ada dampak-dampak psikologis yang harus diperhatikan. Pertama pengalaman kekerasan jelas membekaskan trauma atau rasa takut. Berbagai pengalaman seperti ini perlu mendapat perhatian khusus terutama bagi anak-anak dan perempuan. Kedua, memulangkan kembali pengungsi ke tempat asal berdasar kesepakatan pemerintah. Ketiga, pemulangan para pengungsi terkait sebab lain, yaitu komunitas asal yang sekaligus menjadi komunitas penerima. Konflik kekerasan telah menjadikan mereka terpisah satu sama lain. Keterpisahan ini menyebabkan pengalaman traumatik dengan dinamika

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Op.cit.* Harullah. 2009. *Dendam Konflik Poso: Konflik Poso dan Perspektif Komunitas*. Jakarta: Gramedia Pustaka. Hal 43.

³⁹ http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=4749&coid=3&caid=31&qid=1 Diakses Pada 21 Agustus 2012. Pukul 14.25 WITA

amarah, benci, dan dendam. Keterpisahan itu menjadi unsur yang memperkuat dinamika ini dan bisa menjadi halangan bagi pengungsi untuk kembali. Membuka komunikasi dan interaksi berarti perlu memediasi dan menyalurkan rasa marah dan benci keluar.

Masalah pengungsi Poso menyangkut dinamika interaksi sosial yang tidak begitu saja selesai dengan memulangkan mereka ke tempat asal. Memerhatikan pengalaman kekerasan yang mereka alami dengan seluruh luka yang disisakan, sama pentingnya dengan membangun kembali rumah, sarana, dan prasarana fisik demi pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi yang lebih menjanjikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. A. Peraturan perundangan di Indonesia yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi *internally displaced persons* akibat konflik sosial di Poso yaitu: a. Undang-Undang Dasar 1945; b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai HAM; c. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomo 111 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi. Peraturan-peraturan tersebut berlaku bagi pengungsi dalam negeri karena undang-undang tidak membedakan status warga negara yang dilindungi. Keppres tersebut juga berlaku bagi pengungsi dalam negeri akibat konflik sosial karena bencana dapat dikategorikan sebagai bencana alam (*disaster*) dan bencana buatan manusia (*man made disaster*). Bencana

buatan manusia seperti konflik antar suku, konflik bersenjata, dan lain sebagainya.

- B. Upaya penanganan konflik sosial di Poso dilakukan melalui mediasi kedua pihak yang bertikai yakni masyarakat beragama Islam dengan yang beragama Kristen, dan dimediasi oleh pemerintah pusat sebagai pihak yang netral. Selain itu perlu pendekatan budaya mengingat Poso adalah daerah yang sangat heterogen. Terlebih sebelumnya, masyarakat di Poso baik yang asli maupun pendatang hidup berdampingan dengan damai dengan mengusung nilai-nilai kearifan lokal.
2. Penanganan pengungsi dalam negeri di Poso tidak terlepas dari peranan pemerintah pusat yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat yang bekerja sama dengan pemerintah daerah menampung para pengungsi di gedung-gedung sekolah atau fasilitas publik lainnya sambil menyiapkan barak-barak pengungsian. Para pengungsi juga diberikan bantuan dana, sandang, pangan, sanitasi, dan air bersih.

B. Saran

1. Pemerintah Indonesia sebaiknya membentuk Undang-Undang khusus mengenai perlindungan pengungsi dalam negeri akibat konflik sosial. Undang-undang ini sebaiknya mengatur program tetap tentang penanganan pengungsi akibat konflik sosial, termasuk di dalamnya adalah penetapan status pengungsi dan program relokasi untuk pengungsi yang memilih tidak kembali ke desanya.
2. Pemerintah sebaiknya meningkatkan pelayanan hukum di lokasi pengungsian dengan mendorong peran LSM untuk masuk lewat program penyuluhan dan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Achmad, Romsan dkk. 2003. *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*. Bandung: Sanic Offset.
- Eddy Sudaryono, dkk. 2008. *Pemukiman Kembali Pengungsi Akibat Konflik Sosial*. Jakarta: Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sosial Ekonomi Budaya dan Peran Masyarakat Badan Penelitian Dan Pengembangan Departemen Pekerjaan Umum.
- Harry, Kawilarang. 1984. *Dunia Di Tengah Kemelut Bunga Rampai Masalah Internasional 1983-1984*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press)
- Harullah. 2009. *Dendam Konflik Poso: Konflik Poso dan perspektif Komunitas*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Haryomataram. 2002. *Konflik Bersenjata dan Hukumnya*. Jakarta: Universitas TRISAKTI.
- Jawahir Thontowi. 2002. *Hukum Internasional Di Indonesia Dinamika dan Implementasinya Dalam Beberapa Kasus Kemanusiaan*. Yogyakarta: Madyan Press.
- Judistira K. Garna. 1992. *Teori-Teori Perubahan Sosial*. Bandung: Program Pascasarjana UNPAD.
- Johan Galtung. 2000. *Conflict Transformation by Peaceful Means (the Transcend Method)*. United Nations: United Nations Disaster Management Training Programme.
- Marc, Vincent and Birgitte Refslund Sorensen. 2001. *Caught Between Borders Response Strategies of the Internally Displaced*. London: Pluto Pers.

Ralf Dahrendorf. 1986. *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri; Sebuah Analisa- Kritik V*. Jakarta: Rajawali Pers.

Robbins, Walton and Dutton. 1988. *Violence and The State in Twentieth Century*. Second edition, Englewood Cliffs, New Jersey.

Soerjono Soekanto. 1984. *Beberapa Teori Sosiologi tentang Struktur Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Pres).

Sulaiman Hamid. 2002. *Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.s

ICRC. 2008. *Hukum Humaniter Internasional Menjawab Pertanyaan Anda*.

UNHCR. 2006. *Kenali ICRC*. Hal 3.

UNHCR. 2007. *Melindungi Pengungsi Dan Peran UNHCR*.

UNHCR. 2005. *Pengenalan tentang Perlindungan Internasional Melindungi orang-orang yang menjadi perhatian UNHCR*.

UNHCR. 2007. *Pengungsi Dalam Negeri Sendiri Pertanyaan & Jawaban*.

Jurnal:

Erna Dyah Kususmawati. 2008. *Implementasi Kebijakan Penanganan Pengungsi Dalam Negeri (Internally Displaced Persons-IDP's) Oleh Pemerintah Indonesia*. Volume 1. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Heru Susetyo. 2004. *Kebijakan Penanganan Internally Displaced Persons (IDP's) di Indonesia dan Dunia Internasional*. Volume 2 Nomor 1. Depok: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional-Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Sigit Riyanto. 2004. *Mimbar Hukum Guiding Principles on Internal Displacement: Institusional Nilai-Nilai Kemanusiaan Dalam Instrumen Internasional*. Volume 2 Nomor 1. Depok: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional-Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Stephane Jaquemet. 2004. *Mandat dan Fungsi Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa urusan Pengungsi (UNHCR)*. Volume 2. Nomor 1. Depok: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional-Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Surwandono. 2008. *Konflik Poso dan Public Trust*. Volume 1. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Politik Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Keputusan Presiden:

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi

Prinsip-Prinsip Panduan Tentang Pengungsi Internal:

Guiding Principles on Internal Displacement.

Website:

<http://hery15061993.blogspot.com/2012/01/penyebab-konflik-poso.html>

Diakses

Pada 20 Juni 2012. Pukul 09.04 WITA

<http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik> Diakses Pada 20 Juni 2012. Pukul 10.20 WITA

<http://konflikposo.blogspot.com/2009/03/konflik-poso.html> Diakses Pada 20 Juni 2012. Pukul 09.15 WITA

<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/325875-faktor-penyebab-konflik> Diakses Pada 20 Juni. Pukul: 13.30 WITA

http://posobersatu.multiply.com/journal?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal Diakses Pada 30 Agustus 2012. Pukul 19.46 WITA

<http://saatnyayangmuda.wordpress.com/2009/01/28/sejarah-konflik-poso/> Diakses Pada 20 Juni 2012. Pukul 09.04 WITA

<http://texbuk.blogspot.com/2012/02/dampak-konflik-poso.html>. Diakses Pada 20 Juni 2012 Pukul 09.17 WITA

<http://texbuk.blogspot.com/2012/02/pengertian-konflik-sosial-menurut.html> Diakses Pada 20 Juni 2012. Pukul 10.30 WITA

<http://www.kontras.org/poso/index.php?hal=berita&id=> Diakses Pada 20 Juni 2012. Pukul 10.00 WITA

<http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2009/01/perempuan-pengusngsi-bertahan-dan-berjuang-dalam-keterbatasan.pdf> Diakses Pada Tanggal 25 Juni 2012. Pukul 15.00

<http://www.unhcr.or.id/id/> Diakses 25 Juni 2012. Pukul 10.40 WITA